

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN
(Studi Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

RIZKI RAHMATULLAH, SH
1620123012

Dibawah Bimbingan:

Prof. Dr. H. Yaswirman, MA

H. Syahril Razak, SH., MH

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN

(Studi Pada Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang)

Pada dasarnya, kebutuhan hidup masyarakat bertambah seiring dengan adanya keinginan yang besar dari masyarakat itu sendiri. Kebutuhan yang dimaksud bisa berbentuk barang ataupun berbentuk modal usaha dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan khususnya ekonomi. Pelaksanaan dari perkreditan tidak lepas dari perjanjian dan pengikatan terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur. Pelaksanaan pengikatan jaminan ada dilakukan secara dibawah tangan dan ada yang dilakukan dengan akta notaris dan akta PPAT diantaranya akta jaminan fidusia, SKMHT dan APHT. Dengan pelaksanaan pengikatan perjanjian pinjaman oleh kreditur, maka tidak lepas dari hak dan kewajiban para pihak dan tentunya adanya perlindungan hukum terhadap para pihak tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang kedudukan hukum, bentuk perlindungan dan penyelesaian permasalahan dari pelaksanaan perjanjian pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kreditur dalam pengikatan perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan menjadi lemah karena kreditur tidak mendapatkan hak preferensi (didahulukan) jika debitur wanprestasi, dan kedudukan debitur menjadi kuat karena proses pengikatan perjanjian pinjaman tidak dilakukan secara sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengikatan perjanjian pinjaman secara akta autentik tidak terlaksana sesuai dengan UUJN, karena penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan notaris, sehingga akta autentik terdegradasi menjadi surat dibawah tangan. Bentuk perlindungan hukum dari perjanjian pinjaman dibawah tangan, harus dilaksanakan dengan pengikatan perjanjian pinjaman secara sempurna oleh kreditur dan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan akta notaris harus dihadapan notaris sehingga dapat dikategorikan sebagai akta autentik menurut UUJN. Setiap perjanjian pinjaman, jaminan dan debitur harus diberikan asuransi. penyelesaian permasalahan dari pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa yaitu memberikan surat pemberitahuan kepada debitur wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban, penyelamatan dan penyehatan pinjaman dengan penataan kembali (*Restructuring*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penyelesaian pinjaman dengan *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (diluar pengadilan), penghapusan pinjaman. Disarankan kepada Swamitra Minang Alam Sentosa, Pengikatan perjanjian pinjaman harus dilakukan dengan akta autentik sesuai dengan UUJN dengan biaya ditanggung bersama-sama. Salinan dokumen perjanjian pinjaman diberikan kepada debitur dan jangka waktu asuransi sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Jika dilakukan penjualan jaminan secara dibawah tangan harus dilaksanakan dengan itikad baik .

Kata kunci: Perlindungan hukum, perjanjian pinjaman, wanprestasi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENTS

(Study at Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Padang Branch)

Basically, the life needs of the society increase along with the great desire by society itself. The needs in question can be in the form of goods or in the form of business capital in meeting personal needs and business needs. In channeling funds to the public through credit, it is necessary to strive to achieve an efficient allocation to support equitable development in particular the economy. The implementation of credit is inseparable from the agreement and binding on the guarantees provided by the debtor. The binding guarantee is carried by privately made and there is done by notary deed and PPAT deed including fiduciary deed, SKMHT and APHT. With the implementation of the loan agreement binding by creditors, it is inseparable from the rights and obligations of the parties and of course there is legal protection of these parties. Therefore research is conducted on legal standing, forms of protection and resolution of problems from the implementation of loan agreements. This study uses an empirical juridical approach, namely legal research that refers to primary data and secondary data which are then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the position of the creditor in binding agreements privately made is weak because the creditor does not get preference rights (priority) if the debtor defaults, and the position of the debtor becomes stronger because the loan agreement binding process is not carried out in accordance with the legislation. The binding of the loan agreement in an authentic deed was not carried out in accordance with UUJN, because the signing of the deed was not carried out before the notary, so that the authentic degraded deed became a letter under the hand. The form of legal protection from the loan agreement under the hand must be carried out by binding the loan agreement perfectly by the creditor and signing the loan agreement with the notary deed must be before the notary so that it can be categorized as an authentic deed according to UUJN. Every loan, guarantee and debtor agreement must be given insurance. settlement of problems from the implementation of loan agreements at Swamitra Minang Alam Sentosa, namely giving notification letters to default debtors to carry out obligations, rescue and restructuring loans with restructuring, re-requirements (reconditioning), loan settlement with litigation (court) and non litigation (outside the court), the elimination of loans. Suggested to Swamitra Minang Alam Sentosa, Binding of loan agreements must be carried out with authentic deeds in accordance with UUJN with costs borne together. A copy of the loan agreement document is given to the debtor and the insurance period is in accordance with the loan term. If the sale of collateral is carried out under the hand, it must be carried out in good faith

Keywords: Legal protection, loan agreement, default